



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**PENGARUH PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 18
TAHUN 2000 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG**


Oleh :

YENNISA
03 157 001

Mahasiswa Program S-1 Jurusan Akuntansi

*Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG
2008**

	No Alumni Universitas	YENNISA	No Alumni Fakultas
	<p align="center">BIODATA</p> <p>a). Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 08 Januari 1985 b). Nama Orang Tua : Syafril dan Ermita Hs, SH c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 03157001 f). Tanggal Lulus : 01 November 2008 g). Predikat lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,03 i). Lama Studi : 4 tahun 3 Bulan j). Alamat Orang Tua : Jondul IV Blok RR No. 6 Tabing Padang</p>		

PENGARUH PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2000 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

Skripsi S-1 Oleh Yennisa Pembimbing : *Dra. Riza Reni Yanti, Msi.Ak*

ABSTRAK

Salah satu alternatif yang dipilih oleh pemerintah guna mengantisipasi menurun drastisnya penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi adalah dengan mengefektifkan penerimaan negara dari sektor pajak. Tindak lanjut dari pilihan pemerintah ini diwujudkan dengan melakukan pembaharuan sistem perpajakan nasional pada tahun 1983. Kemudian pada bulan Juli tahun 2000 pemerintah kembali melakukan pembaharuan sistem perpajakan nasional. Undang-Undang tersebut adalah UU RI No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), salah satunya adalah UU RI No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM).

Penelitian ini mencoba melihat pengaruh UU No. 18 Tahun 2000 terhadap penerimaan PPN KLU jasa di KPP Padang. Hasil temuan menunjukkan bahwa perubahan UU No. 18 Tahun 2000 berpengaruh terhadap penerimaan PPN KLU jasa di KPP Padang. Dengan demikian, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perubahan sistem perpajakan melalui UU No. 18 Tahun 2000 membawa dampak positif karena peningkatan penerimaan PPN KLU Jasa di KPP Padang.

Keyword: PPN, UU No. 18 tahun 2000

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 01 November 2008, dengan penguji :

Tanda Tangan	1.	2.	3.
Nama Terang	Dra. Hj. Sri Daryanti Zen, MBA. Ak	Dra. Nini Syofri Yeni, Msi. Ak	Aries Tanno, SE. Msi. Ak

Mengetahui :

Ketua Jurusan : **Drs. Syahril Ali, M.Si,Ak**
NIP. 131 598 288

Tandatangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan negara merupakan tulang punggung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terutama untuk mencapai kemandirian dan keberlangsungan dalam membiayai pengeluaran negara. Minyak dan gas bumi yang selama ini merupakan sektor dominan sebagai sumber penerimaan negara, sejak pertengahan tahun 1980-an mengalami goncangan karena turunnya harga minyak di pasaran dunia. Maka dari itu pemerintah harus mencari alternatif sumber pembiayaan dari sektor lain agar pembangunan dapat terus dijalankan.

Salah satu alternatif yang dipilih oleh pemerintah guna mengantisipasi menurun drastisnya penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi adalah dengan mengefektifkan penerimaan negara dari sektor pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan salah satu fokus perhatian dari pemerintah. Maka dari itu pemerintah akan selalu memperbaiki sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Tindak lanjut dari pilihan pemerintah ini diwujudkan dengan melakukan pembaharuan sistem perpajakan nasional pada tahun 1983. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU

PPN dan PPnBM), Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB) dan bea materai.

Kemudian pada bulan Juli tahun 2000 pemerintah kembali melakukan pembaharuan sistem perpajakan nasional. Undang-Undang tersebut adalah UU RI No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UU RI No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), UU RI No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), UU RI No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dan yang terakhir adalah UU RI No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Dengan adanya perubahan sistem perpajakan nasional ini diharapkan agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat ditingkatkan sehingga dapat menutupi pengeluaran negara.

Sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat serta guna meningkatkan dan mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan perubahan terhadap peraturan perpajakan pada tahun 2000 yang berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2001. Perubahan tersebut mencakup lima buah undang-undang yang salah satu diantaranya adalah undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah melalui Undang-undang No. 18 Tahun 2000 yang merupakan perubahan kedua terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1983.

Penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini memiliki kontribusi yang cukup besar guna menunjang

BAB V

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penerimaan PPN sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Penelitian ini terdiri dari pemberlakuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM sebagai variabel independen dan penerimaan PPN sebagai variabel dependen.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan pengaruh pemberlakuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 yang signifikan terhadap penerimaan PPN Klasifikasi Lapangan Usaha Jasa di KPP Padang. Berikut ini disajikan kesimpulan yang dapat diambil, antara lain :

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak dalam negeri yang dikenakan atas setiap kenaikan nilai tambah dari barang atau jasa yang diserahkan, yang dipungut pada berbagai jalur produksi dan distribusi. Nilai tambah merupakan selisih antara harga pasar dari output suatu perusahaan dengan harga beli input berupa barang atau jasa yang ditransfer dari perusahaan lain. Dalam hal ini nilai tambah yang diperhitungkan adalah pertambahan nilai rupiah dari barang yang diproses yang terjadi pada masing-masing sektor.

DAFTAR PUSTAKA

- Berita Pajak. (2003). **Membangun Kemandirian Bangsa Melalui Pajak: Antara Idealita dan Realita** No. 1482/ Tahun XXXV/1 Januari, hal 46.
- Negara Republik Indonesia. (2000). **UU Pajak Tahun 2000**, Salemba Empat, Jakarta.
- Sumitro, (1990). **Pajak Pertambahan Nilai**, Edisi Revisi, PT Eresco, Bandung.
- Waluyo, (2000). **Perpajakan Indonesia**, Salemba Empat, Jakarta.
- Aries Tanno, (2005). **"Diktat Kuliah Perpajakan Indonesia"**. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- Yurniwati, (2005). **"Diktat Kuliah Metodologi Penelitian"**. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- Siagian, Dergibson, (2002). **Metode Statistika**. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- S.R Soemarso, (2007). **Perpajakan Pendekatan Komprehensif**. Jakarta : Salemba Empat
- Lombantotuan Sophar, (1996). **Akuntansi Pajak Edisi Revisi**. Jakarta : PT Gramedia Media Sarana Indonesia.
- K.J. Rinsky, (2005). **Pajak dan Strategi Bisnis**. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Haula Rosdiana, Rasin Tarigan, (2005). **Perpajakan Teori dan Aplikasi**. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.